

Vol. 1 – Edisi 5

PDRD LENS

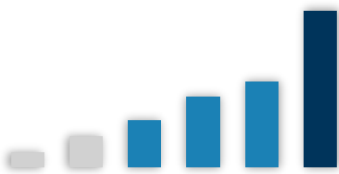
Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



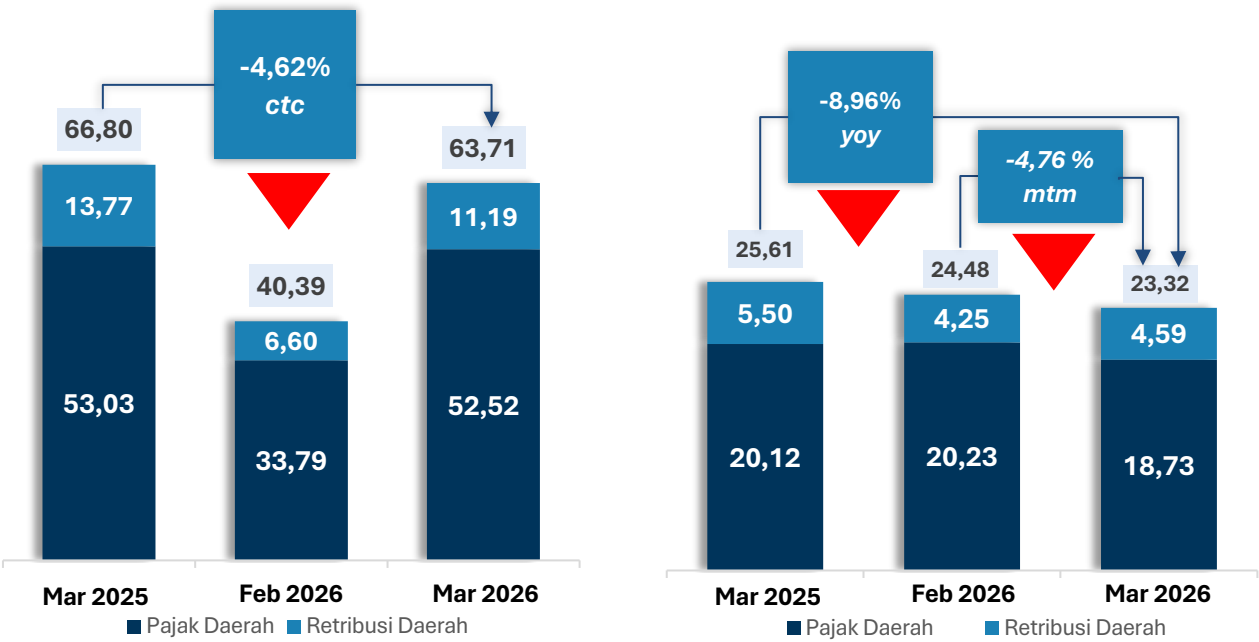
MEI
2026



PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD Maret 2025-2026 (triliun rupiah)

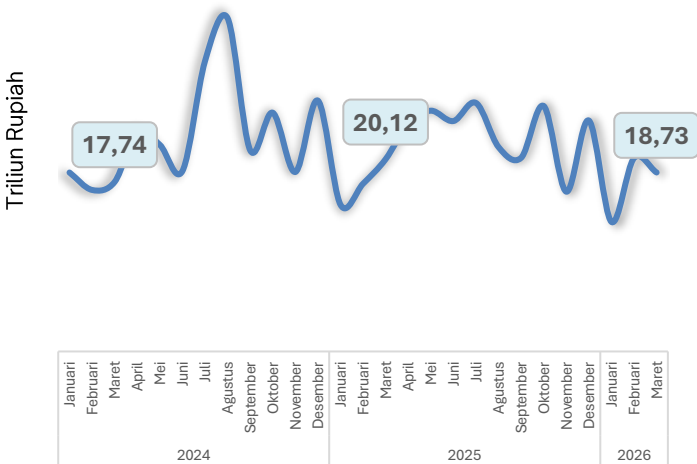


Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada bulan Maret 2026 terkontraksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun bulan sebelumnya. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami realisasi penerimaan yang lebih rendah dibandingkan Maret tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak daerah pada bulan Maret tumbuh negatif 6,92% yoy menjadi Rp18,73 triliun atau lebih rendah 7,46% dari bulan sebelumnya. Sementara itu, meskipun penerimaan Retribusi Daerah pada bulan maret terkontraksi 16,41% secara yoy, namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka penerimaannya mengalami kenaikan 8,09% menjadi Rp4,59 Triliun. Kendati demikian, pertumbuhan Retribusi secara mtm belum mampu mendongkrak kontraksi penerimaan PDRD akumulatif hingga Maret 2026.



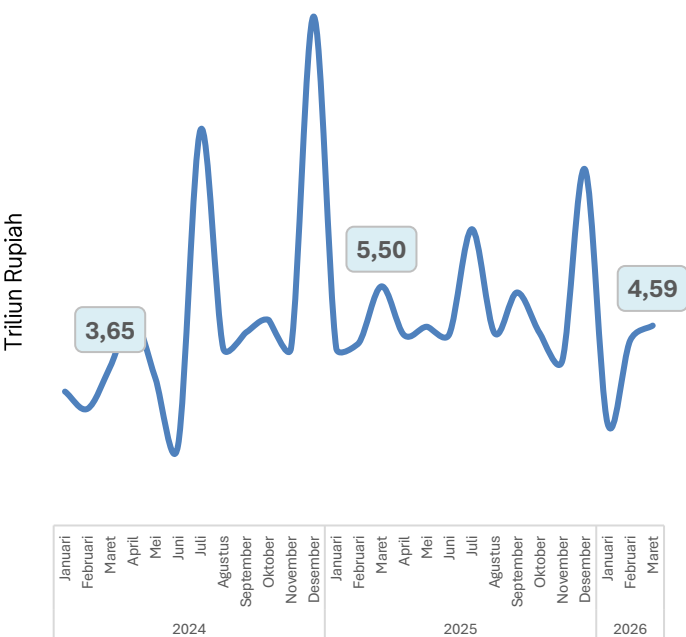
Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

Pola penerimaan pajak daerah bulan Maret 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya terjadi lonjakan penerimaan pada bulan Maret, pada tahun 2026 ini, justru terjadi kontraksi penerimaan pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah pada Maret 2026 ini sekaligus melanjutkan pola fluktuatif yang terjadi mulai penghujung Triwulan 3 Tahun 2025 hingga akhir Triwulan I Tahun 2026. Efek seasonal dari hari besar keagamaan Idulfitri belum tercermin dalam pola penerimaan pajak daerah pada Maret ini.

Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

Pola yang berbeda terjadi pada penerimaan Retribusi Daerah, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan penerimaan bulan Maret. Perlambatan ini utamanya terjadi karena adanya kenaikan tipis penerimaan retribusi daerah dari bulan sebelumnya, namun masih di bawah penerimaan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Meskipun demikian, penerimaan Retribusi Daerah merangkak naik setelah mengalami kontraksi dalam pada awal tahun. Kendati terjadi perlambatan pertumbuhan, pola penerimaan retribusi daerah untuk periode Januari hingga Maret selama tiga tahun terakhir lebih identik dibandingkan dengan pola penerimaan pajak daerah.

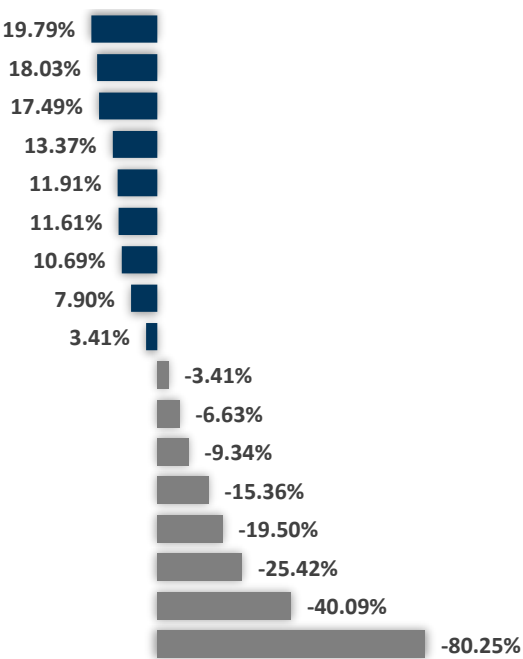


Sebagian besar pajak daerah mencatatkan kinerja positif pada bulan Maret ini. Tumbuhnya penerimaan pajak daerah secara akumulatif ditopang oleh peningkatan sembilan jenis pajak daerah. Sementara itu, delapan jenis pajak daerah lainnya mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hampir keseluruhan jenis PBJT tumbuh positif jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya pada periode yang sama, kecuali PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terkontraksi 3,41% yoy. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PAT, dan PBJT atas Tenaga Listrik, tumbuh signifikan diatas 15% yoy.

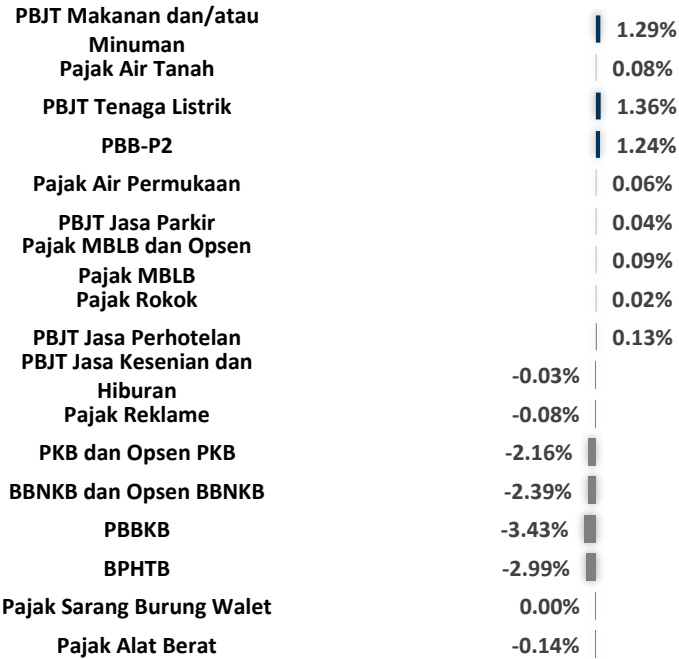
Adapun jika dilihat dari efeknya terhadap pertumbuhan, maka PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Perhotelan, serta PBB-P2 memberikan andil tertinggi dengan kontribusi berturut-turut sebesar 1,36%, 1,29% dan 1,24%. Sementara itu, dari sisi kontraksi pajak daerah, pajak-pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor yaitu PKB beserta Opsennya, BBNKB beserta Opsennya, dan PBBKB, mengalami penurunan yang cukup signifikan di atas 9% secara yoy. Dengan demikian, pertumbuhan positif dari sembilan jenis pajak daerah pada bulan Maret belum mampu mengompensasi penurunan jenis pajak daerah lainnya.

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Pajak Daerah Maret 2026

Pertumbuhan (% , yoy)



Andil Pertumbuhan (%)



Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

REVENUE DETAIL



Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Hingga Maret 2026 (c to c)

dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak ¹⁾	2025	2026	Growth (%)	Andil Pertumbuhan (%)
Pajak Rokok	0.09	0.16	71.79% ▲	0.12% ▲
Pajak MBLB dan Opsen MBLB	0.52	0.59	13.02% ▲	0.13% ▲
PBJT Jasa Perhotelan	2.38	2.64	10.95% ▲	0.49% ▲
PBJT Makanan dan/atau Minuman	4.28	4.68	9.21% ▲	0.74% ▲
PAT	0.26	0.28	9.13% ▲	0.04% ▲
PBJT Jasa Parkir	0.21	0.23	9.02% ▲	0.04% ▲
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	0.62	0.65	5.27% ▲	0.06% ▲
PBBKB	9.10	9.23	1.43% ▲	0.25% ▲
PBJT Tenaga Listrik	5.11	5.17	1.25% ▲	0.12% ▲
PBB-P2	3.22	3.26	1.17% ▲	0.07% ▲
PAP	0.31	0.31	-0.65% ▼	-0.004% ▼
BBNKB dan Opsen BBNKB	7.84	7.60	-3.12% ▼	-0.46% ▼
PKB dan Opsen PKB	12.99	12.15	-6.41% ▼	-1.57% ▼
Pajak Reklame	0.72	0.67	-7.14% ▼	-0.10% ▼
BPHTB	5.27	4.87	-7.60% ▼	-0.75% ▼
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	-34.38% ▼	-0.001% ▼
PAB	0.10	0.02	-80.35% ▼	-0.15% ▼

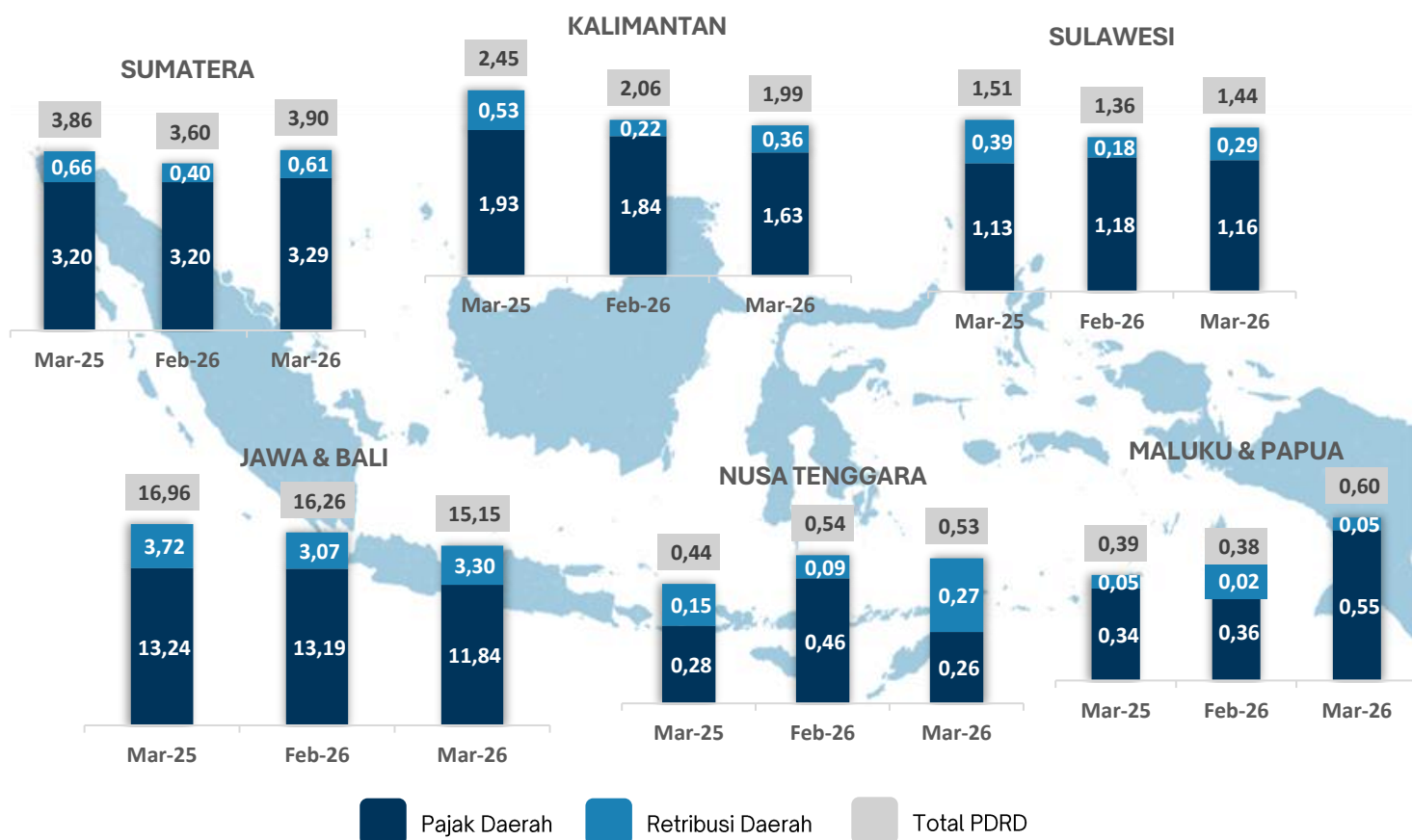
Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

Secara akumulatif hingga Maret 2026, terdapat sepuluh jenis pajak daerah yang mencatatkan kinerja positif. Sementara tujuh jenis pajak daerah lainnya masih berkontraksi hingga penerimaan bulan Maret ini. Keseluruhan jenis PBJT tumbuh positif pada periode Januari hingga Maret ini. Bahkan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan PBJT atas Jasa Perhotelan memiliki andil sangat signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah periode Januari hingga Maret. Sementara itu, untuk jenis pajak daerah yang memiliki andil terhadap kontraksi penerimaan, tiga di antaranya memiliki kontribusi yang paling signifikan, yaitu PKB beserta Opsennya, BPHTB, dan BBNKB beserta Opsennya. Dengan demikian, pertumbuhan positif dari sepuluh jenis pajak daerah secara akumulatif hingga Maret belum mampu mengompensasi penurunan jenis pajak daerah lainnya.

¹⁾ PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PAB: Pajak Alat Berat



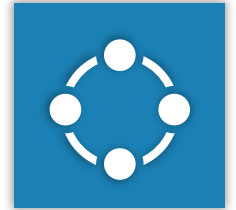
Realisasi PDRD Maret Secara Spasial (yoy dan mtm)



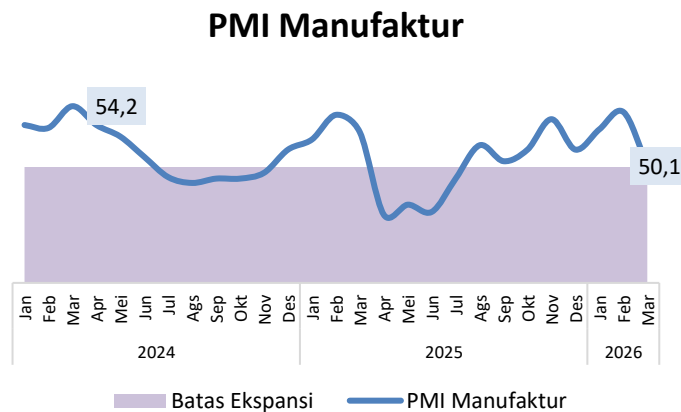
Sumber: SIKD, data per 20 Mei 2026

Secara spasial, tidak keseluruhan wilayah mencatatkan pertumbuhan negatif penerimaan PDRD pada bulan Maret. Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua tumbuh positif secara yoy. Sementara itu, penerimaan PDRD wilayah lainnya terkontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Wilayah Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan penerimaan PDRD tertinggi hingga mencapai lebih dari 50%, baik secara yoy maupun mtm. Hal tersebut tak lepas dari pengaruh kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 63,21% secara yoy. Sementara itu, di wilayah Nusa Tenggara, pertumbuhan penerimaan PDRD pada Maret 2026 secara yoy didorong oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar 75,67%. Wilayah-wilayah yang mengalami kontraksi penerimaan, yaitu Jawa dan Bali dan Kalimantan, dipicu oleh penurunan penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk wilayah Sulawesi, kontraksinya disumbangkan oleh Retribusi Daerah.

RELATED INDICATORS

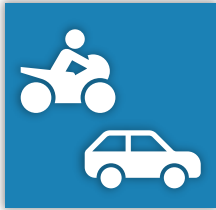


Aktivitas produksi sektor manufaktur pada bulan Maret masih berada dalam fase ekspansi meskipun terjadi penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. *Purchasing Managers' Index* Manufaktur (PMI Manufaktur) pada bulan Maret sebesar 50,1, sangat tipis diatas batas bawah ekspansi. Nilai PMI Manufaktur pada Maret sekaligus meneruskan tren ekspansi manufaktur selama delapan bulan berturut - turut. Rasionalisasi atas permintaan global ditengarai menjadi perlambatan ekspansi produksi dari sektor manufaktur. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan basis pajak daerah, perlambatan PMI Manufaktur dapat mereduksi permintaan atas barang atau jasa yang menjadi basis pemungutan pajak daerah.

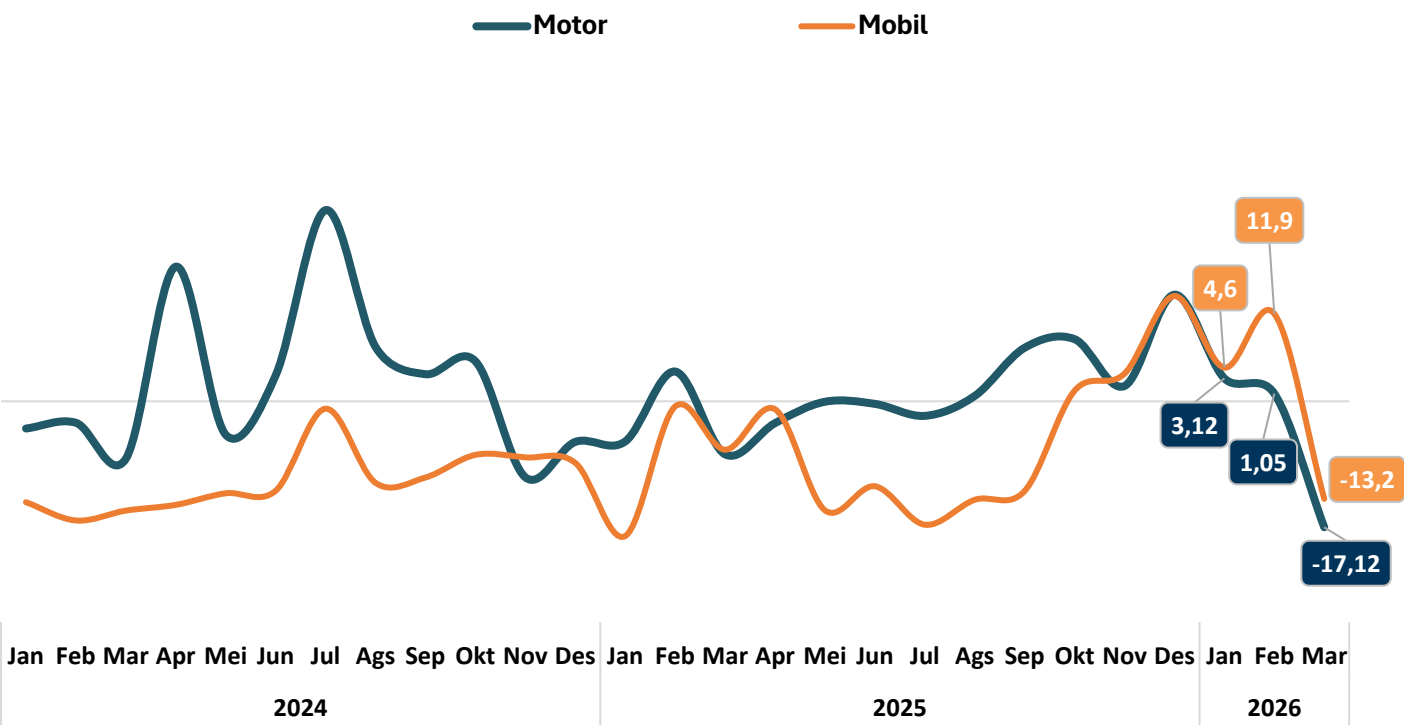


Sementara itu, dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat masih cukup terjaga pada periode Maret 2026 ini. Meskipun terdapat perlambatan, *Retail Sales Index* (RSI) masih tumbuh sebesar 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun jika dibandingkan bulan sebelumnya, RSI juga terpantau tumbuh mencapai 10,3%. Pertumbuhan RSI ini didorong oleh kenaikan indeks penjualan komoditas Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Barang Budaya dan Rekreasi.





Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor (% yoy)



Sumber: Gaikindo dan AISI

Sektor otomotif yang menjadi salah satu leading indicator aktivitas ekonomi mengalami kontraksi. Penjualan kendaraan roda empat pada Maret 2026 mencapai 66,59 ribu unit. Penjualan tersebut terkontraksi 13,2% secara yoy setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan penjualan selama lima bulan berturut-turut. Hal yang sama juga dialami pada penjualan kendaraan bermotor roda dua. Setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif dalam delapan bulan berturut-turut, pada Maret ini, penjualan kendaraan roda dua mengalami penurunan 17,12% yoy atau tercatat sebanyak 448,97 ribu unit yang terjual. Kontraksi penjualan kendaraan bermotor ini memicu penurunan basis pajak sehingga berdampak pada turunnya penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB.

VEHICLES TAX COMPLIANCE



Kepatuhan Pembayaran Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Unit Kendaraan)

Kategori	Mar-25	Jan-Mar 25	Mar-26	Jan-Mar 26	growth (yoy)	growth (ctc)
Lunas	4,098,018	12,491,766	3,981,060	12,245,525	-2.85%	-1.97%
Tahun lalu	259,761	969,081	198,856	844,207	-23.45%	-12.89%
Kendaraan Tahun berjalan + Baru	3,838,257	11,522,685	3,782,204	11,401,318	-1.46%	-1.05%
Belum Lunas	5,230,148	14,879,526	5,409,093	15,434,780	3.42%	3.73%
Kendaraan Aktif	9,328,166	27,371,292	9,390,153	27,680,305	0.66%	1.13%
Tingkat Kepatuhan	43.93%	45.64%	42.40%	44.24%	-1.54%	-1.40%

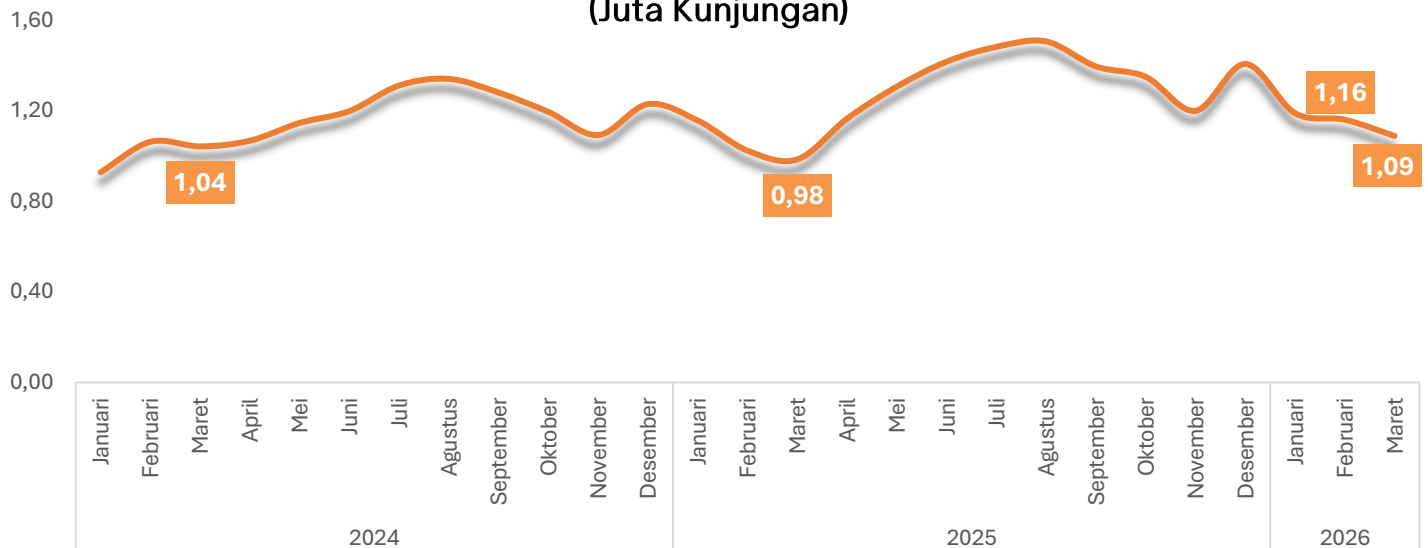
Sumber: Jasa Raharja

Jumlah kendaraan yang melunasi kewajiban PKB pada bulan Maret menurun 2,85% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini memicu penurunan tingkat kepatuhan pembayaran PKB hingga 1,4% untuk periode Januari – Maret. Beberapa catatan yang memicu hal tersebut antara lain jumlah kendaraan baru turun, jumlah kendaraan yang jatuh tempo yang melakukan pelunasan juga turun, serta peningkatan kendaraan aktif. Penurunan tingkat kepatuhan berdampak pada terkontraksinya penerimaan PKB pada bulan Maret ini.

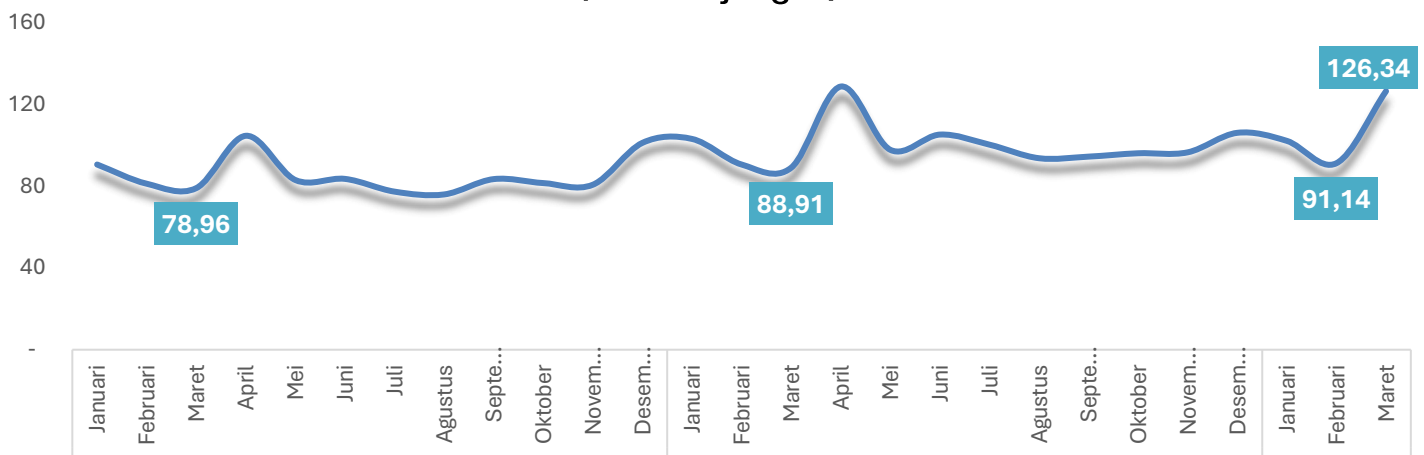
TOURISM & HOSPITALITY TREND



**Kunjungan Wisatawan Mancanegara
(Juta Kunjungan)**



**Kunjungan Wisatawan Nusantara
(Juta Kunjungan)**



Sumber: BPS

Sementara itu, pada sektor pariwisata, terjadi peningkatan perjalanan wisata baik oleh kedatangan wisatawan mancanegara maupun perjalanan wisatawan nusantara pada bulan Maret secara yoy. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Maret 2026 ini sebanyak 126,34 juta orang, meningkat 42,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan tumbuh 38,63% secara mtm. Momen hari besar Idulfitri yang terjadi di bulan Maret memicu mobilitas domestik. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan 10,5% secara yoy pada bulan Maret ini, namun menurun 6,17% dibandingkan bulan sebelumnya.



Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)

Klasifikasi Hotel	Mar-25	Feb-26	Mar-26
Bintang 1	25.60	29.95	31,62
Bintang 2	33.27	42.43	33,27
Bintang 3	32.71	43.34	41,74
Bintang 4	34.63	47.63	44,65
Bintang 5	35.91	48.65	44,84
TPK Bintang	33.56	44.89	42,78
TPK Nonbintang dan Akomodasi Lainnya	18.73	21.91	23,47
TPK (Total)	27.52	33.56	33,28

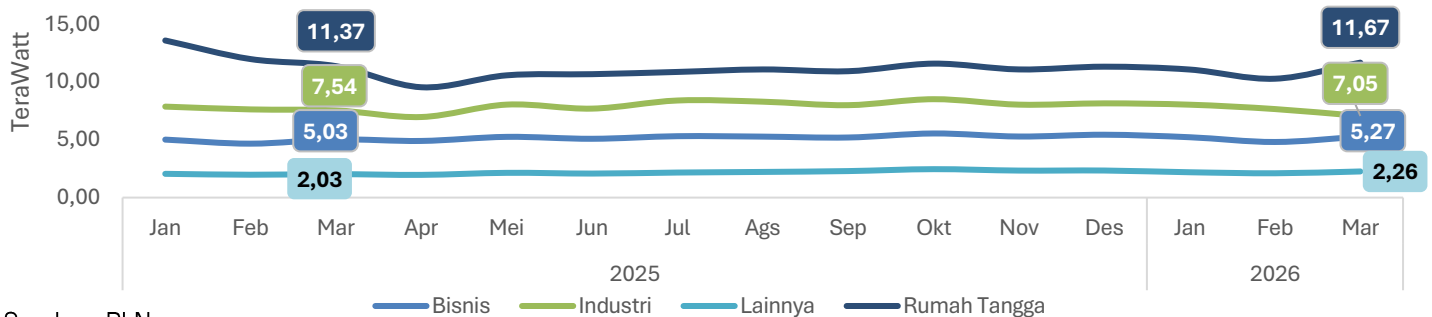
Sumber: BPS

Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak pada kenaikan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK). Baik hotel bintang maupun hotel non bintang mengalami peningkatan TPK pada bulan Maret ini jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya. Secara keseluruhan TPK meningkat 5,76% secara yoy dan terkontraksi tipis 0,28% secara mtm. TPK Hotel Bintang meningkat sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, namun menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara, TPK Non Bintang dan Akomodasi Lainnya tercatat meningkat baik secara yoy maupun mtm. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata secara yoy yang memicu peningkatan TPK pada Maret ini sejalan dengan pertumbuhan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan.

ENERGY CONSUMPTION

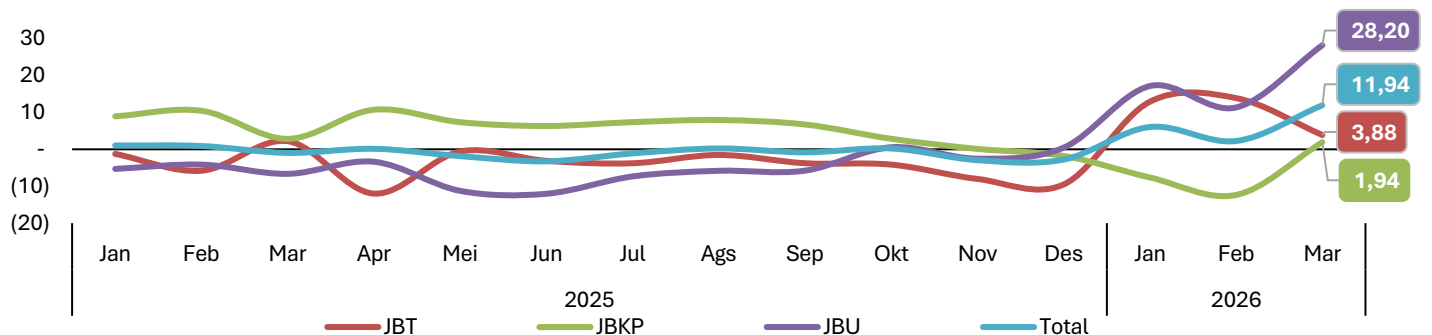


Penjualan Listrik s.d. Maret 2026



Sumber: PLN

Pertumbuhan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor s.d. Maret 2026 (%)



Sumber: BPH Migas

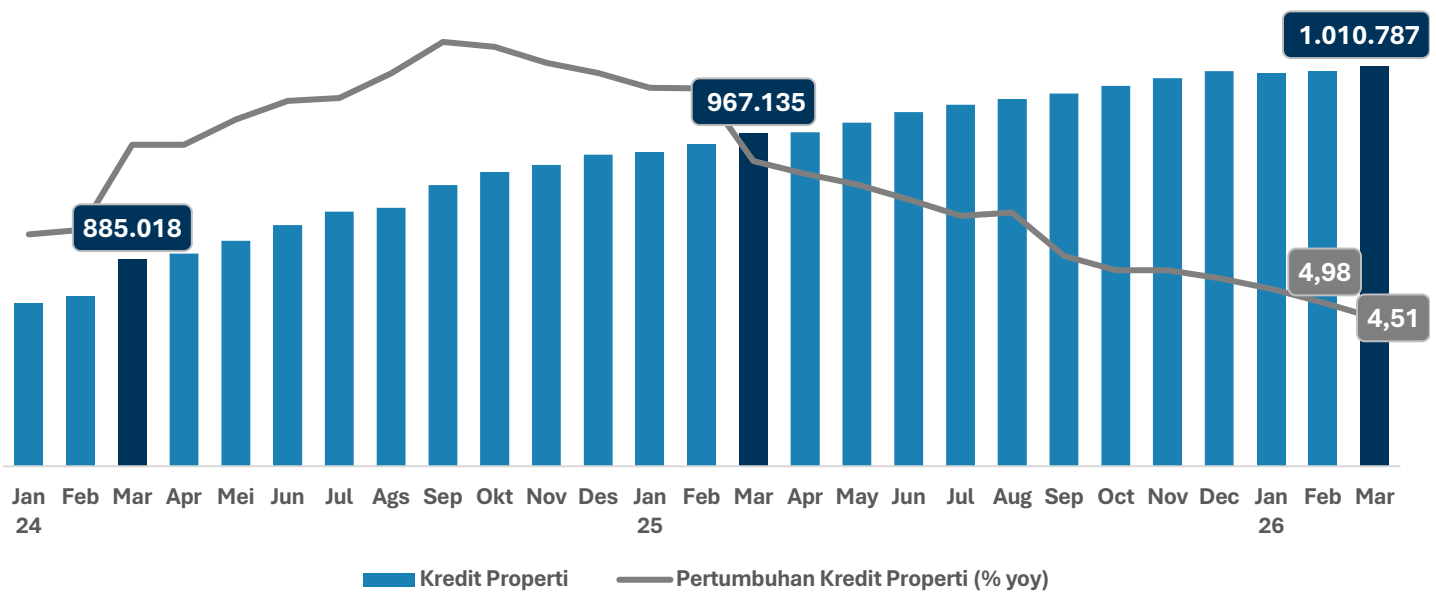
Indikator lain yang merepresentasikan basis pajak PDRD adalah konsumsi energi. Pada Maret ini, konsumsi energi baik tenaga listrik maupun Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) tumbuh positif. Penjualan listrik pada Maret tumbuh sebesar 1,1% secara yoy dan 5,68% secara mtm. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan penjualan listrik seluruh kategori pelanggan kecuali kategori Industri yang berkontraksi 6,43% yoy. Pada kategori bisnis dan rumah tangga, konsumsi listrik tercatat tetap tumbuh masing-masing 4,65% dan 2,67% yoy. Kenaikan penjualan listrik mendorong naiknya penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Sementara itu, penjualan BBKB seluruh kategori (JBT, JBKP dan JBU) pada bulan Maret menunjukkan peningkatan secara positif dibandingkan tahun sebelumnya. BBKB kategori JBU pada bulan maret memiliki akselerasi penjualan yang paling tinggi, mencapai 2,8 Juta kiloliter atau meningkat 28,2% yoy. Peningkatan ini tak lepas dari peningkatan mobilitas transportasi saat libur lebaran. Namun demikian, pertumbuhan penjualan BBKB tidak serta merta sejalan dengan penerimaan PBBKB yang justru berkontraksi. Tentunya bukan terkait basis pajak yang menjadi faktornya, tetapi lebih terkait pada administrasi pemungutannya yaitu adanya lag waktu penerimaan akibat masa pajak atau efektifitas pemungutan PBBKB, terutama atas JBU, yang masih kurang memadai.

¹ Kebijakan jenis-jenis BBM meliputi Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri dari minyak tanah dan solar yang diberikan subsidi dan kompensasi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni bensin RON 90 Pertalite yang diberikan kompensasi, dan Jenis BBM Umum (JBU) untuk semua jenis BBM yang tidak diberikan subsidi dan kompensasi (harga *business to business*).



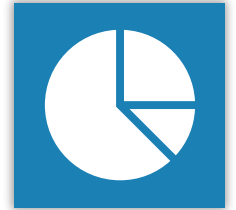
Realisasi dan Pertumbuhan Kredit Properti (miliar rupiah)



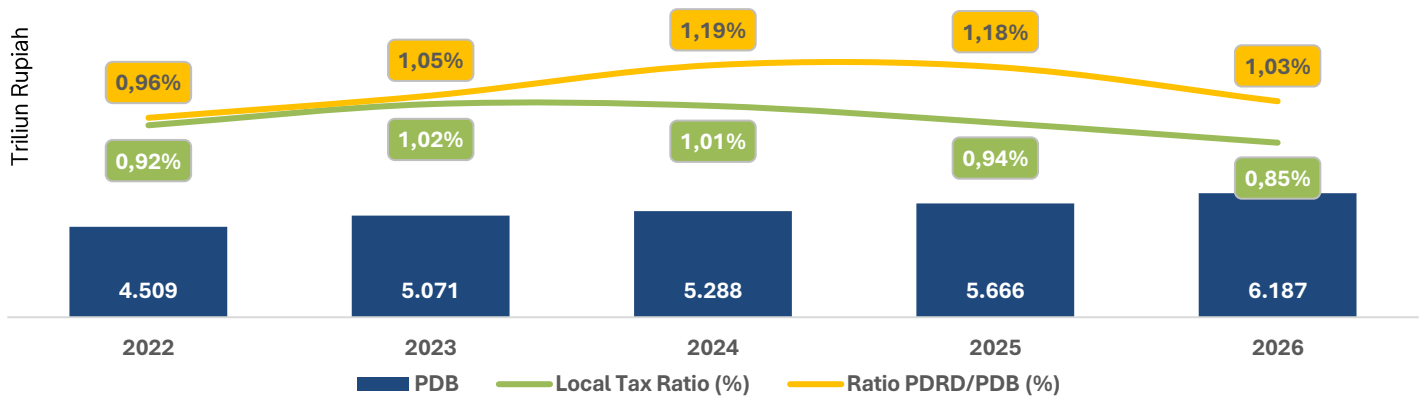
Sumber: SKKI, Bank Indonesia

Sektor properti juga menunjukkan sinyal positif pada Maret 2026. Meskipun terjadi perlambatan, kredit properti tetap tumbuh 4,51% secara yoy. Kenaikan ini didorong oleh kredit kepemilikan rumah tapak terutama untuk tipe 21 m2 hingga 70 m2 yang tumbuh sebesar 5,85% yoy dan rumah tapak tipe diatas 70 m2 sebesar 4,07%. Kenaikan tersebut sekaligus meredam kontraksi kredit properti pada hunian rumah tapak tipe s.d. 21 m2. Saat ini, 70,88% kepemilikan rumah diperoleh melalui kredit perbankan sehingga tumbuhnya kredit ini menjadi tanda meningkatnya basis penerimaan BPHTB. Namun demikian, respon penerimaan BPHTB pun kurang sejalan dengan peningkatan basis pajak ini. Hal ini ditengarai lag antara penyaluran kredit dengan administrasi pengalihan hak properti.

ECONOMIC BASE ANALYSIS



Local Tax Ratio dan Rasio PDRD/PDB Triwulan I



Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan I 2026 masih melanjutkan tren peningkatan secara persisten. Secara nominal, PDB Triwulan I 2026 tumbuh 9,20% secara yoy. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I mencapai 5,61%. Idealnya kenaikan PDB direspon dengan kenaikan pajak daerah dengan tingkat *buoyancy* tertentu. Namun tren dalam beberapa tahun terakhir ini, penerimaan pajak daerah justru inelastis terhadap kenaikan PDB. Hal ini terindikasi dari *local tax ratio* yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan rasio penerimaan PDRD terhadap PDB juga menunjukkan tren penurunan. Fenomena ini kemungkinan disebabkan faktor pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti kenaikan sektor-sektor yang menjadi basis pajak daerah, terdapat kebijakan tertentu yang memperlebar *tax gap*, atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun.

Anomali Pajak Daerah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2026 tetap melanjutkan tren positif. Meningkat 5,61% secara yoy, ditopang oleh hampir seluruh sektor yang tumbuh positif. Hanya dua sektor yang berkontraksi yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sementara itu, sektor – sektor lainnya tumbuh positif secara yoy.

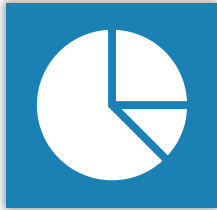
Laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 ini tidak diikuti oleh pertumbuhan pajak daerah. Kondisi ini menjadi anomali karena di tengah kenaikan basis pajak, penerimaan pajak daerah justru turun. dan *local tax ratio* cenderung semakin menurun. Artinya, penurunan penerimaan pajak daerah tersebut bukan terkait dengan makin menyempitnya basis pajak daerah.

Tidak semua pajak daerah terkait langsung dengan transaksi ekonomi. Pajak daerah yang berbasis kepemilikan tidak terkait langsung dengan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah PKB dan Opsen PKB. Pajak ini memiliki kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan pajak daerah secara nasional. Tahun 2025, kontribusi PKB dan Opsen PKB mencapai 21,3% dari total penerimaan pajak daerah secara nasional. Namun demikian tren realisasi penerimaannya menurun.

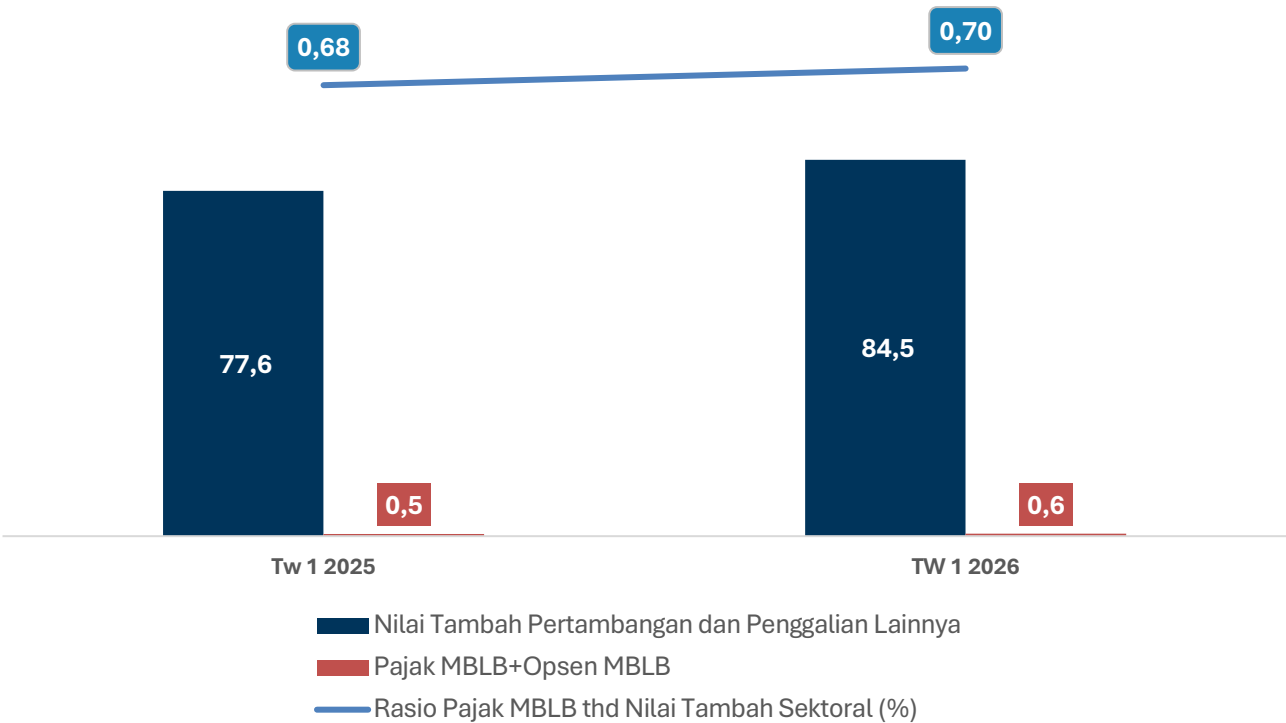
Hingga Triwulan Pertama 2026, terdapat kurang lebih 1,82 juta unit Kendaraan baru yang terjual. Semestinya, penjualan tersebut menambah basis penerimaan PKB dan Opsen PKB. Namun demikian kontribusi penerimaan PKB dan Opsen PKB dari penambahan jumlah kendaraan justru terdistorsi dengan tingkat kepatuhan yang semakin menurun. Jumlah kendaraan yang melunasi kewajibannya juga menurun 1,97%. Tingkat kepatuhan pembayaran PKB pun hingga Triwulan I 2026 masih dibawah 50%. Dengan demikian, penurunan penerimaan pajak daerah di tengah laju pertumbuhan ekonomi bisa jadi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan yang menurun.

RELATED SECTORS ANALYSIS

MINING SECTOR



Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terhadap Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya

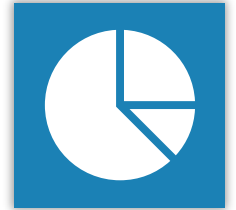


Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

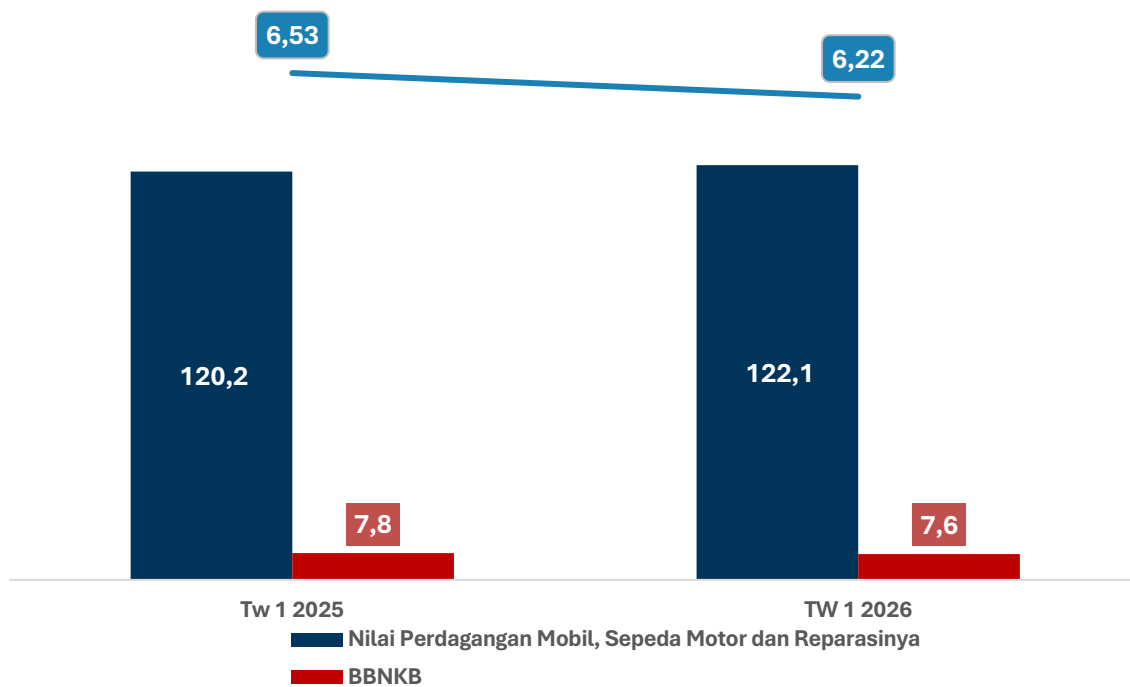
Efektifitas pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan rasio antara penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terhadap nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Namun demikian, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang dapat dihasilkan dari sektor ini masih jauh dari nilai potensialnya, yaitu masih dibawah 1%. Artinya masih terdapat tax gap yang cukup lebar antara potensi dengan realisasi penerimaannya.

RELATED SECTORS ANALYSIS

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF AUTOMOBILES AND MOTORCYCLES



BBNKB terhadap Sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya

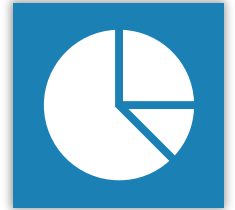


Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

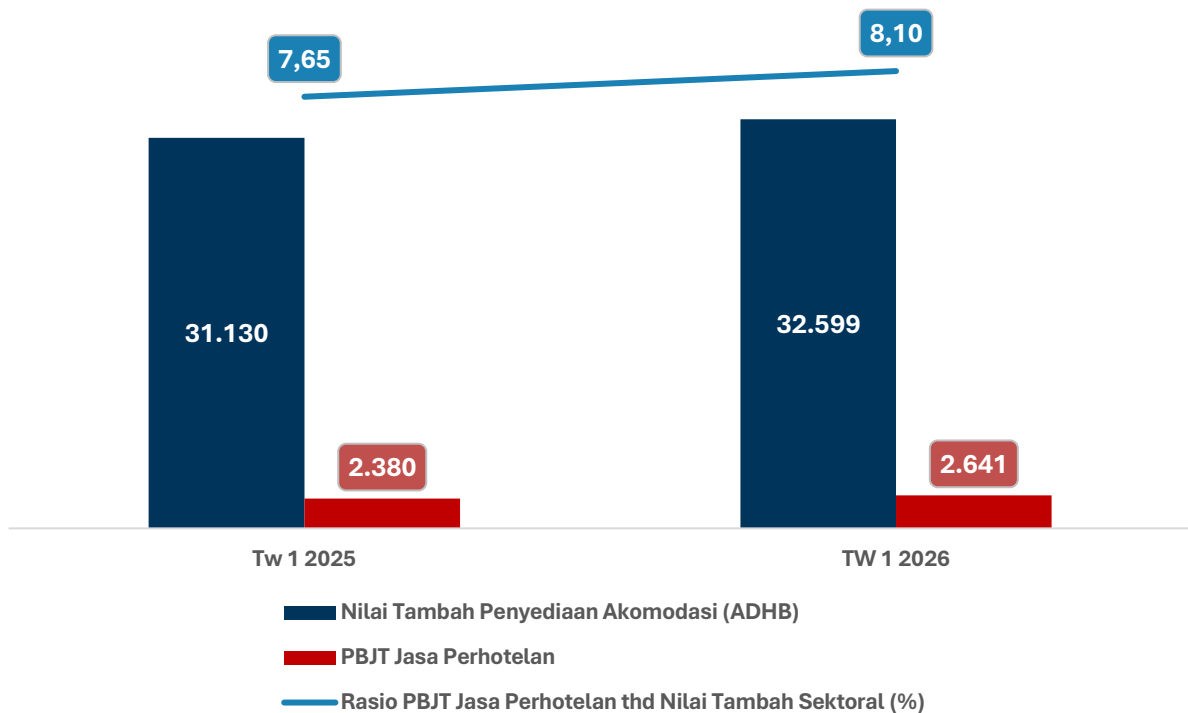
Pertumbuhan sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya pada triwulan 1 2026 ternyata belum mampu mendorong kenaikan BBNKB. Hal ini ditunjukkan dari efektivitas pemungutan yang diukur dari rasio penerimaan BBNKB terhadap nilai tambah sektoral terkaitnya, dimana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjualan kendaraan bermotor yang menurun hingga triwulan I ini mengonfirmasi terkontraksinya penerimaan BBNKB. Dengan kata lain, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya lebih banyak didorong oleh penjualan kendaraan bermotor bekas atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang semakin meningkat. Keduanya merupakan pengecualian dari objek BBNKB.

RELATED SECTORS ANALYSIS

ACCOMODATION



PBJT atas Jasa Perhotelan terhadap Sektor Penyediaan Akomodasi

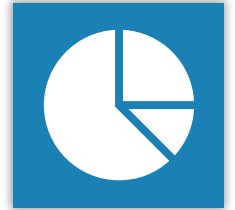


Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

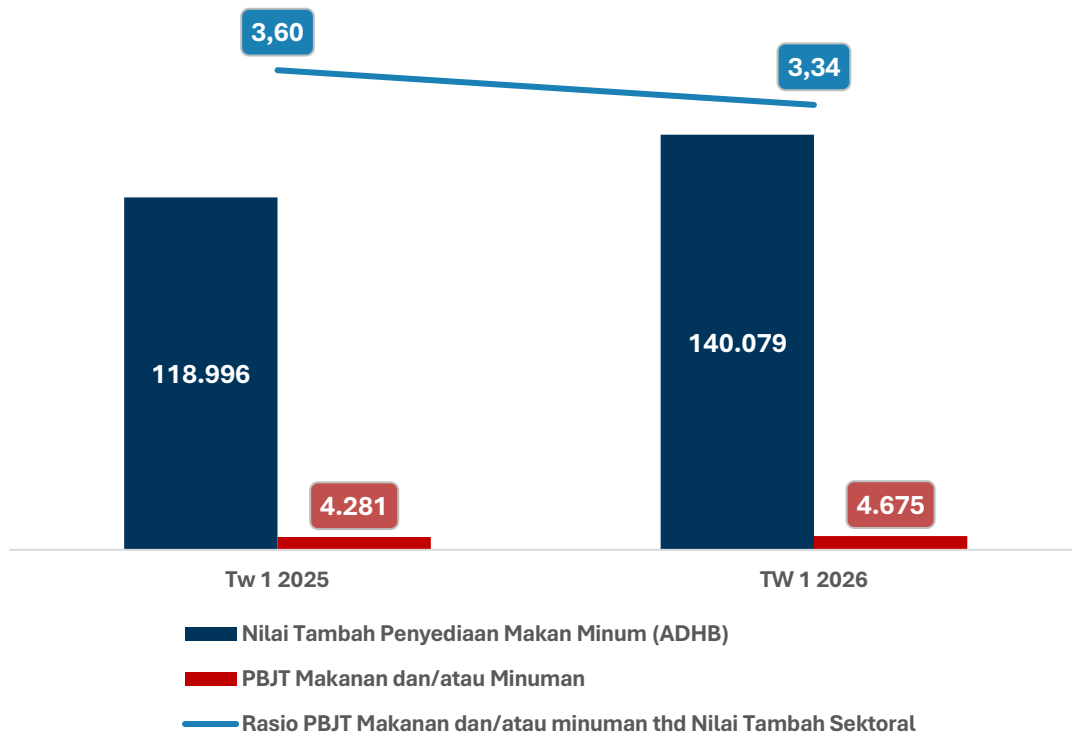
Setelah cukup mengalami tekanan pada tahun 2025, sektor penyediaan akomodasi pada Triwulan I 2026 ini tumbuh cukup signifikan dan memicu kenaikan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan. Membaiknya kinerja sektor pariwisata ditandai dengan kenaikan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Kenaikan tersebut mencapai lebih dari 10% pada Triwulan I ini, yang berdampak pada peningkatan tingkat penghunian kamar hotel dan selanjutnya berefek pada kenaikan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan. Momen hari besar keagamaan Idulfitri yang jatuh pada penghujung Triwulan I berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat dan mendorong konsumsi untuk sektor penyediaan akomodasi.

RELATED SECTORS ANALYSIS

F&B Service



PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap Sektor Penyediaan Makan Minum

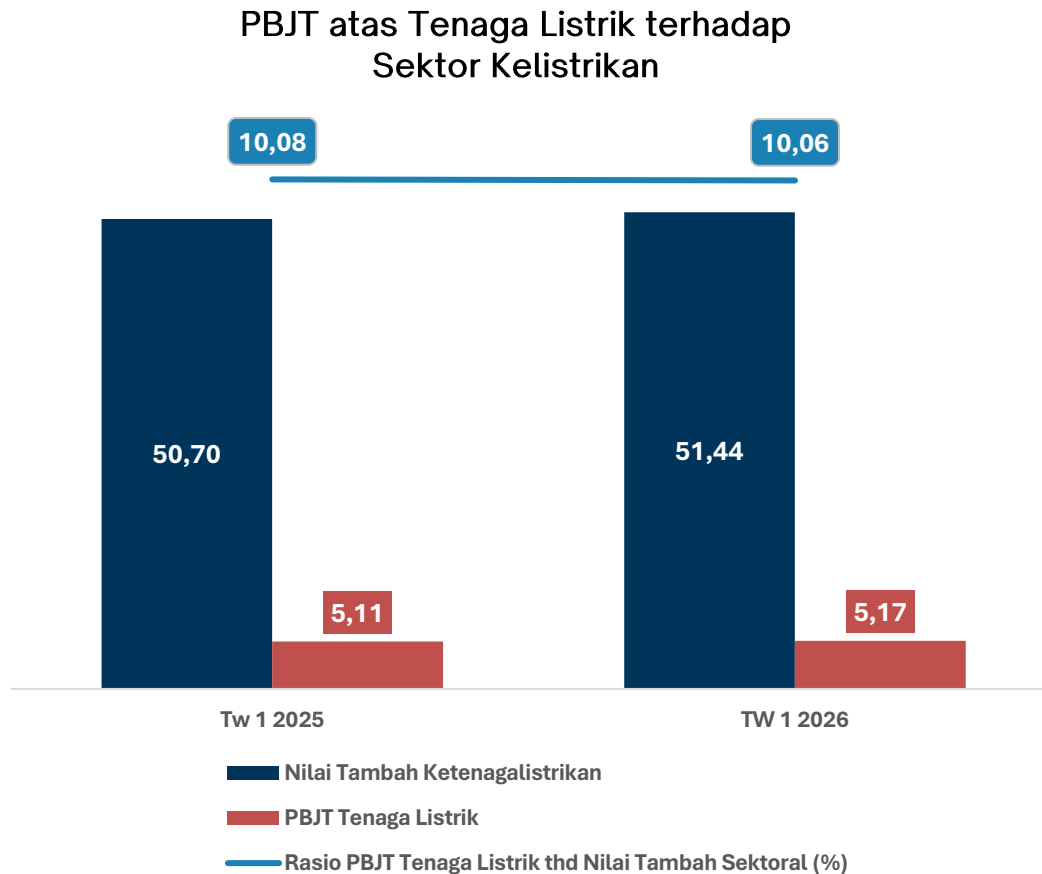
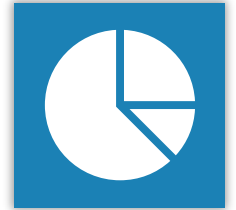


Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

Pertumbuhan sektor penyediaan makan minum triwulan I 2026 diikuti dengan meningkatnya penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Secara nominal, sektor ini tumbuh 17,72% yoy yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga untuk komoditas hotel dan restoran sebesar 8,86% di Triwulan I. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan sektoralnya, sehingga efektifitas pemungutannya menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Turunnya efektifitas pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditengarai karena pertumbuhan sektor penyediaan makan minum lebih didorong oleh pedagang makanan dan minuman di sektor informal yang belum memenuhi kriteria tertentu untuk dipungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, seperti pedagang makanan dan minuman tidak tetap.

RELATED SECTORS ANALYSIS

ELECTRICITY



Sumber: BPS dan SIKD data per 20 Mei 2026

Secara riil, nilai tambah sektor ketenagalistrikan berkontraksi tipis 0,25% secara yoy pada Triwulan I 2026.

Meskipun demikian, secara nominal nilai tambah tetap tumbuh 1,46% secara yoy. Kondisi tersebut mengindikasikan produksi listrik berkontraksi namun terdapat penyesuaian atau kenaikan harga listrik, sehingga basis pajak untuk PBJT atas Tenaga Listrik semestinya juga tumbuh. Adapun kenaikan secara nominal tersebut sejalan dengan kenaikan penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Dalam konteks administrasi pemungutan, efektifitas pemungutan PBJT Tenaga Listrik relatif stabil dimana rasio antara PBJT atas Tenaga Listrik terhadap nilai tambah sektoralnya relatif sama. Namun demikian, fenomena kontraksi produksi listrik di tengah pertumbuhan positif ekonomi atau sektor Industri Manufaktur membawa implikasi penting pada aspek perpajakan daerah. Mengingat konsumsi listrik adalah salah satu *leading indicator* sektor manufaktur atau perekonomian secara umum, maka pada kondisi ini terdapat kemungkinan sektor industri menghasilkan sendiri listrik untuk proses produksi. Hal tersebut merupakan potensi PBJT atas Tenaga Listrik yang dapat dipungut, meskipun dengan tarif yang lebih rendah.

PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Trianto Budi Utama
7. Muhammad Fawwaz Ananda



PDRD

LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



Diterbitkan Tahun 2026
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>